

## **PENGEMBANGAN WILAYAH PERBATASAN KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA DENGAN DISTRIK ENCLAVE OEKUSI SEBAGAI KAWASAN AGROPOLITAN**

***(Development of Boundary Area of Timor Tengah Utara Regency and Oekusi Enclave District as Agropolitan Region)***

**Werenfridus Taena<sup>1)</sup>, Ernan Rustiadi<sup>2)</sup>, dan Himawan Hariyoga<sup>3)</sup>**

### **ABSTRACT**

*The research has been conducted in border area of Timor Tengah Utara Regency, Nusa Tenggara Timur, and Oekusi Enclave District, East Timor. The objective of the research is to analyze the center for development of agropolitan. The method use were AHP, LQ, SSA, I-O and descriptive statistic analysis. The result showed that subdistrict Miomafo Timur is center for agropolitan development located in the border area of District Enclave Oekusi. It is suggested that it is a need to develop mutual and networking with other region in Timor Tengah Utara Regency and Oekusi Enclave District.*

*Key words: boundary area, agropolitan*

### **PENDAHULUAN**

Berpisahannya Timor Leste telah berpengaruh terhadap aspek politik, keamanan, sosial, budaya, dan ekonomi, tetapi pengembangan wilayah perbatasan semula lebih memprioritaskan aspek keamanan dan memperlakukan wilayah perbatasan sebagai daerah belakang sebagaimana yang dirasakan oleh masyarakat di wilayah perbatasan dalam bentuk kesenjangan pembangunan dan kemiskinan. Kabupaten Timor Tengah Utara sebagai salah satu kabupaten yang berbatasan darat dengan Timor Leste mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi karena kehilangan sebagian potensi pendapatan sebagai hasil interaksi antara kedua wilayah. Oleh karena itu, Kabupaten Timor Tengah Utara yang juga tergolong sebagai kabupaten tertinggal harus mencari sumber pendapatan alternatif agar dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja ekonomi wilayah perbatasan Kabupaten Timor Tengah Utara dengan distrik *enclave* Oekusi. Melalui pembentukan pusat-pusat pertumbuhan baru di wilayah perbatasan diharapkan dapat melayani daerah *hinterland* dengan mendistribusikan kebutuhan masyarakat di wilayah *hinterland* baik kebutuhan produksi maupun konsumsi. Selain itu, pusat pertumbuhan tersebut dapat berfungsi untuk menampung, mengolah, serta memasarkan produk-produk yang dihasilkan oleh daerah *hinterland*. Hal ini akan mengurangi

---

<sup>1)</sup> Staf pengajar pada Program Studi Agribisnis-Faperta-Universitas Timor

<sup>2)</sup> Staf pengajar pada Departemen Ilmu Ekonomi dan Sumberdaya Lingkungan, Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB

<sup>3)</sup> Direktur Otonomi Daerah-Bappenas RI

kebocoran wilayah karena aktivitas ekonomi pada pusat pengembangan tersebut dapat memberikan nilai tambah yang tinggi bagi masyarakat serta mengurangi biaya transportasi.

Penerimaan daerah Kabupaten Timor Tengah Utara didominasi oleh dana perimbangan 90,34%, sedangkan Kabupaten Timor Tengah Utara merupakan salah satu kabupaten yang memiliki PAD rendah, kontribusi PAD terhadap penerimaan daerah pada tahun 2006 hanya sebesar 3,07%. Oleh karena itu, pengembangan pusat pertumbuhan dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan meningkatkan PAD agar tidak terus bergantung pada keuangan dari pusat. Susunan penerimaan daerah Kabupaten Timor Tengah Utara pada tahun 2006 selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Struktur penerimaan keuangan menurut jenis penerimaan daerah otonom Kabupaten Timor Tengah Utara tahun anggaran 2006

No	Jenis Penerimaan	Jumlah (Rp)	Kontribusi (%)
1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun yang lalu	21.158.521.000	6,56
2	Pendapatan asli daerah	9.917.006.000	3,07
	a. Pajak-pajak daerah	758.686.000	0,24
	b. Retribusi daerah	1.916.758.000	0,59
	c. Bagian laba BUMD	554.672.000	0,17
	d. Penerimaan lain-lain PAD yang sah	6.686.709.000	2,07
3	Dana perimbangan	291.439.755.000	90,34
	a. Bagi hasil pajak dan bukan pajak	16.268.413.000	5,04
	b. Dana alokasi umum (DAU)	239.558.000.000	74,26
	c. Dana alokasi khusus (DAK)	29.180.000.000	9,05
	d. Keuangan dari provinsi	6.433.342.000	1,99
4	Lain-lain pendapatan yang sah	88.240.000	0,03
	Jumlah	322.603.522.000	100

Sumber: Timor Tengah Utara Dalam Angka 2006

Pengembangan ekonomi wilayah perbatasan harus pula memperhatikan ketersediaan sumber daya pembangunan wilayah tersebut baik sumber daya manusia, sumber daya buatan, sumber daya sosial maupun kapasitas produksi aktivitas ekonomi. Selain itu, pengembangan ekonomi wilayah perbatasan harus didukung dengan alokasi anggaran yang sesuai dengan penentuan sumber daya yang prioritas dikembangkan agar mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Timor Tengah Utara dan manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Kabupaten Timor Tengah Utara. Penerimaan daerah Kabupaten Timor Tengah Utara pada tahun 2006 adalah sebesar Rp 322.603.522.000 dengan alokasi untuk anggaran pembangunan sebesar Rp 67.727.323.258 (25,99%) dari total pengeluaran sebesar Rp 260.556.806.382, sedangkan 74,01% dialokasikan untuk belanja rutin. Meskipun demikian, pada tahun 2007 alokasi anggaran untuk belanja pembangunan telah mencapai 61,19%, sedangkan 38,81% anggaran dialokasikan untuk belanja rutin.

Alokasi anggaran pembangunan tertinggi pada tahun 2006 masih didominasi oleh pembangunan sumber daya buatan berupa transportasi, pemukiman, sumber daya air, dan irigasi (35,89%) yang berarti bahwa sumber daya buatan menjadi prioritas utama pembangunan. Selanjutnya, sumber daya manusia memperoleh prioritas kedua, yakni sebesar 31,56% yang didistribusikan untuk kesehatan, pendidikan, tenaga kerja, agama dan peranan wanita, iptek, serta aparatur pemerintah dan pengawasan. Sumber daya sosial menjadi prioritas

ketiga, yakni dalam bentuk pengeluaran untuk aturan hukum sebesar 17,73%. Sebesar 11,49% ditujukan untuk pengembangan kapasitas produksi aktivitas ekonomi dengan fokus pada pengembangan sektor pertanian sebesar 7,65% (Rp 5.178.533.681). Selanjutnya, berturut-turut adalah sektor perdagangan, sektor industri, serta sektor pertambangan dan energi.

Kondisi tersebut tidak berbeda jauh dengan alokasi anggaran untuk belanja pembangunan pada tahun 2007 yang secara berturut-turut sebagai berikut: 33,5% untuk pengembangan sumber daya buatan; 24,71% untuk pengembangan sumber daya manusia; 15,27% untuk pengembangan kapasitas produksi aktivitas ekonomi; 10,67% untuk sumber daya sosial. Meskipun demikian, pemerintah mulai mengalokasikan anggaran cukup tinggi untuk pengembangan kapasitas produksi aktivitas ekonomi sehingga diharapkan dapat meningkatkan PAD Kabupaten Timor Tengah Utara. Alokasi anggaran pembangunan di Kabupaten Timor Tengah Utara pada tahun 2006 selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Alokasi anggaran untuk belanja pembangunan di Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2006

Alokasi anggaran untuk belanja pembangunan	Tahun 2006		Tahun 2007	
	Jumlah (Rp)	(%)	Jumlah (Rp)	(%)
Sektor industri	282.593.925	0,42	6.949.260.989	2,79
Sektor pertanian	5.178.533.681	7,65	18.239.220.820	7,31
Sektor sumber daya air dan irrigasi	2.677.577.442	3,95	9.853.050.934	3,95
Sektor tenaga kerja	176.621.200	0,26	498.820.857	0,20
Sektor perdagangan	1.999.352.021	2,95	7.098.550.592	2,85
Transportasi	18.559.356.045	27,40	62.988.260.550	25,25
Pertambangan dan energi	317.918.165	0,47	5.786.540.044	2,32
Pariwisata, pos dan telekomunikasi	1.483.618.107	2,19	5.289.834.507	2,12
Pembangunan daerah dan pemukiman	3.073.208.937	4,54	10.724.840.943	4,30
Lingkungan hidup dan tata ruang	854.846.624	1,26	2.946.091.161	1,18
Pendidikan dan kebudayaan	5.055.154.884	7,46	17.484.406.596	7,01
Kesehatan dan kesejahteraan	5.333.960.340	7,88	22.424.501.109	8,99
Peranan wanita	7.361.571.754	10,87	2.469.221.399	0,99
Perumahan dan pemukiman	211.945.443	0,31	23.082.880.924	9,25
Agama	1.271.672.663	1,88	4.938.883.689	1,98
Iptek	600.512.091	0,89	2.697.026.895	1,08
Hukum	12.010.241.825	17,73	26.612.872.915	10,67
Aparatur pemerintah dan pengawasan	1.059.627.819	1,56	11.123.905.829	4,46
Penerangan, komunikasi dan media informasi	219.010.292	0,32	8.206.751.160	3,29
Jumlah	67.727.323.258	100,00	249.414.921.913	100,00
Jumlah alokasi anggaran untuk belanja rutin	192.829.483.214		158.193.599.671	
Total	260.556.806.382		407.608.521.584	

Sumber: Buku Besar Pemda Kabupaten Timor Tengah Utara (2006, 2007)

Alokasi anggaran pembangunan untuk sumber daya manusia menjadi prioritas kedua karena indikator pengukuran output sumber daya manusia yang tidak dapat diukur dalam waktu singkat dan dalam bentuk fisik jika dibandingkan dengan indikator pembangunan terhadap sumber daya buatan yang dalam alokasi anggaran pembangunannya menempati prioritas pertama. Paradigma seperti ini harus diubah karena melalui investasi yang besar terhadap pengembangan sumber daya manusia dapat meningkatkan kapasitas produksi aktivitas ekonomi dan selanjutnya dapat menggerakkan perekonomian secara keseluruhan. Melalui alokasi anggaran pembangunan seperti yang ditampilkan pada Tabel 2, hanya menghasilkan PAD Kabupaten Timor Tengah Utara sebesar 3,07% dari total

penerimaan daerah pada tahun 2006. Apabila anggaran dapat dialokasikan dengan tepat dalam arti diprioritaskan pada pengembangan sumber daya manusia dan diarahkan pada pengembangan kapasitas produksi aktivitas ekonomi dalam sebuah model agropolitan, diyakini PAD Kabupaten Timor Tengah Utara dapat ditingkatkan sekaligus mengurangi kemiskinan serta ketimpangan pembangunan wilayah.

Keadaan wilayah perbatasan yang memiliki keterbatasan sumber daya pembangunan dapat dipacu dengan menentukan prioritas pembangunan yang tepat dalam sebuah model pengembangan ekonomi yang menjamin terarahnya kegiatan-kegiatan ekonomi tersebut. Oleh karena itu, pengembangan wilayah perbatasan dapat dikembangkan menjadi kawasan agropolitan. Kawasan agropolitan di wilayah perbatasan memiliki nilai strategis karena jika dikembangkan dengan baik, akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebab 74,68% rumah tangga di Kabupaten Timor Tengah Utara bekerja di sektor pertanian. Selain itu, pengembangan agropolitan diharapkan dapat mengurangi kesenjangan pembangunan karena masyarakat semakin dekat dengan pusat pertumbuhan baru yang dapat meningkatkan pelayanan terhadap daerah *hinterland* sebagaimana dikatakan Taena *et al.* (2008) pada penelitian terdahulu.

Penentuan lokasi yang tepat dalam pengembangan wilayah perbatasan Kabupaten Timor Tengah Utara dengan distrik *enclave* Oekusi sebagai kawasan agropolitan akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat Kabupaten Timor Tengah Utara melalui jaringan interaksi yang saling menguntungkan antardesa, kecamatan, kabupaten lain atau bahkan dengan negara tetangga. Penentuan lokasi agropolitan lebih tepat berada pada wilayah kecamatan dan/atau beberapa kecamatan (Rustiadi dan Pranoto, 2007). Selanjutnya dinyatakan bahwa kriteria penentuan lokasi perlu memperhatikan aspek sumber daya manusia, potensi unggulan dan produk olahan unggulan, sumber daya buatan dan dukungan kebijakan baik dari tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian mengenai potensi sumber daya pembangunan per kecamatan. Dalam penelitian ini, kriteria utama yang menjadi fokus adalah kriteria potensi unggulan (*leading sector*), sedangkan kriteria sumber daya pembangunan lainnya merupakan kriteria tambahan.

## **METODE PENELITIAN**

### **Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah perbatasan Kabupaten Timor Tengah Utara dengan distrik *enclave* Oekusi. Kegiatan pengumpulan data dilakukan pada bulan Maret-April 2009.

### **Metode Pengumpulan Data**

Penelitian ini merupakan penelitian lanjutan dari penelitian sebelumnya yang berbasis data primer. Oleh karena itu, demi memperkuat hasil penelitian terdahulu, penelitian ini lebih fokus menggunakan data sekunder. Data sekunder berupa data potensi desa, data PDRB dan input-output Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2006, serta data lain yang terkait dengan penelitian ini yang diperoleh,

antara lain, dari BPS, Bappenas, Bappeda Nusa Tenggara Timur, dan Bappeda Timor Tengah Utara.

### **Model Analisis Data**

Model analisis data yang digunakan untuk mengidentifikasi sumber daya yang dimiliki wilayah perbatasan Kabupaten Timor Tengah Utara dengan distrik *enclave* Oekusi adalah dengan melakukan analisis statistik deskriptif terhadap sumber daya pembangunan yang mencakup sumber daya manusia, sumber daya buatan, sumber daya sosial, dan kapasitas produksi aktivitas ekonomi. Selanjutnya, dilakukan analisis deskriptif ketersediaan sumber daya per kecamatan di 8 kecamatan di Kabupaten Timor Tengah Utara (tidak termasuk Kecamatan Kota Kefamenanu, ibu kota Kabupaten Timor Tengah Utara) dengan maksud untuk mengetahui daya dukung sumber daya di setiap kecamatan sehingga dapat menentukan lokasi pengembangan agropolitan karena menurut Rustiadi dan Pranoto (2007) pengembangan agropolitan lebih tepat dikembangkan di kecamatan atau beberapa kecamatan. Sumber daya yang dianalisis dikategorikan menjadi kriteria utama, yakni kapasitas produksi aktivitas ekonomi. Sumber daya pendukung lainnya adalah sumber daya manusia, sumber daya buatan, dan sumber daya sosial.

Kapasitas produksi aktivitas ekonomi dianalisis dengan AHP untuk data primer, sedangkan data sekunder menggunakan analisa LQ,SSA,I-O Kabupaten Timor Tengah Utara, selanjutnya dilakukan analisis LQ lebih lanjut dengan menggunakan data PDRB per kecamatan. Analisis ini dilengkapi dengan analisis pemetaan data potensi ekonomi (komoditas pertanian, industri, dan pemanfaatan fasilitas kredit) per kecamatan. Data sumber daya manusia berupa jumlah penduduk, penduduk usia produktif, pengangguran, urbanisasi per kecamatan. Sumber daya sosial berupa regulasi dari pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten. Selain itu, data jumlah kelompok tani per kecamatan juga ditampilkan. Selanjutnya, sumber daya buatan berupa deskripsi ketersediaan sumber daya ekonomi, pendidikan, dan kesehatan per kecamatan di Kabupaten Timor Tengah Utara ditampilkan pula.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kriteria Utama (Kapasitas Produksi Aktivitas Ekonomi)**

Suatu lokasi ditetapkan menjadi lokasi agropolitan karena memiliki potensi unggulan dan produk olahan unggulan tertentu. Berdasarkan hasil analisis AHP, LQ, SSA, dan input-output diperoleh komoditas-komoditas yang dapat dikembangkan di Kabupaten Timor Tengah Utara karena merupakan sektor unggulan dan atau *leading sector* di Kabupaten Timor Tengah Utara sebagaimana pada Tabel 3.

Banyaknya komoditas yang menjadi prioritas pengembangan agropolitan di wilayah perbatasan dapat dikembangkan di seluruh kecamatan di Kabupaten Timor Tengah Utara yang disesuaikan dengan kondisi wilayah dan komoditi unggulan pada setiap wilayah kecamatan. Selanjutnya, dalam revisi RTRW kabupaten terdapat beberapa kecamatan yang diprioritaskan pengembangannya

untuk kawasan agropolitan. Lokasi pengembangan agropolitan adalah di kecamatan Miomafo Barat, Miomafo Timur, Insana, Insana Utara, Biboki Anleu, dan Noemuti. Pengembangan agropolitan pada kecamatan-kecamatan tersebut disesuaikan dengan potensi unggulan di atas.

Tabel 3. Rangkuman sektor unggulan dari hasil AHP, analisis LQ, SSA, dan analisis input-output

No	Analisis	Sektor
1	AHP	Pangan dan palawija, peternakan, dan perkebunan
2	LQ	Tanaman bahan makanan, peternakan, dan kehutanan
3	SSA	Tanaman bahan makanan, kehutanan, perikanan, dan perdagangan
4	I-O (keterkaitan dan NTB)	Jagung, peternakan, padi, sayur dan buah, dan industri makanan dan minuman

Sumber: Data (diolah), 2009

Oleh karena itu, diperlukan pewilayahan komoditas menurut kecamatan sehingga setiap kecamatan dapat memiliki spesialisasi dalam mengembangkan komoditi tertentu. Pewilayahan dapat dilakukan dengan menganalisis sektor basis dari setiap kecamatan dan selanjutnya memetakan data produksi per komoditi dari setiap kecamatan. Hasil analisis LQ per kecamatan untuk subsektor pertanian dapat dilihat pada Tabel 4, yang menunjukkan bahwa tanaman bahan makanan lebih tepat dikembangkan di Kecamatan Miomafo Timur (1,6555), Miomafo Barat (1,6528), dan Kecamatan Insana (1,6335). Tanaman perkebunan lebih tepat dikembangkan di Kecamatan Biboki Utara (2,5504), Noemuti (1,9594), Biboki Selatan (1,7038), dan Kecamatan Insana Utara (1,6421). Peternakan lebih tepat dikembangkan di Kecamatan Biboki Anleu (1,6505), Kecamatan Miomafo Timur (1,5574), Kecamatan Insana Utara (1,5414), dan Kecamatan Biboki Selatan (1,4448).

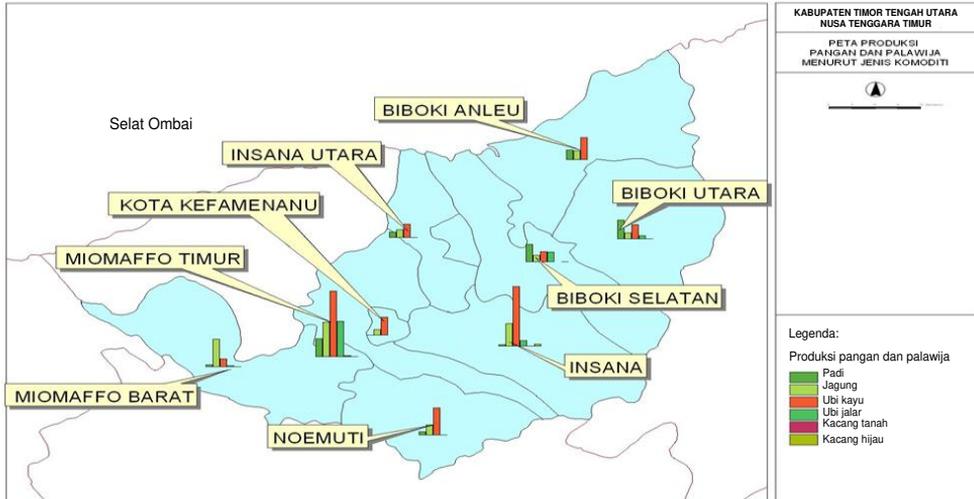
Tabel 4. Hasil analisis LQ sektor pertanian per kecamatan tahun 2006 berdasarkan harga konstan tahun 2000

Kecamatan	Pangan	Perkebunan	Peternakan	Kehutanan	Perikanan
Miomafo Barat	1,6528	1,0799	1,3197	1,3303	0,0000
Miomafo Timur	1,6555	1,0353	1,5574	1,1112	0,0000
Noemuti	1,1540	1,9594	1,3541	1,2417	0,0000
Kota Kefamenanu	0,1569	0,1224	0,1482	0,1606	0,0000
Insana	1,6335	0,9499	1,0702	1,0582	0,0000
Insana Utara	0,8023	1,6421	1,5414	1,6734	9,5012
Biboki Selatan	0,9227	1,7038	1,4448	1,7165	3,8131
Biboki Utara	1,1337	2,5504	1,2725	1,7587	0,0000
Biboki Anleu	1,1600	1,2294	1,6505	1,7762	3,4591

Sumber: Data PDRB per Kecamatan (2006), diolah

Data PDRB yang digunakan untuk analisis LQ merupakan data nilai agregat komoditas untuk setiap subsektor/kecamatan. Oleh karena itu, perlu penelusuran lebih lanjut dengan memetakan wilayah kecamatan berdasarkan data produksi komoditas dari setiap subsektor pertanian tersebut. Pemetaan data produksi untuk komoditas pertanian tanaman pangan dan palawija per kecamatan ditampilkan pada Gambar 1, yang menunjukkan bahwa seluruh kecamatan di Kabupaten Timor Tengah Utara memiliki potensi pengembangan komoditas pangan terutama jagung, ubi kayu, dan padi. Namun, kecamatan yang lebih layak untuk

pengembangan dengan komoditas jagung sebagai komoditas utama yang dibudidayakan oleh masyarakat Timor Tengah Utara adalah Kecamatan Miomafo Timur. Produksi jagung di Kecamatan Miomafo Timur pada tahun 2006 adalah 5.339 ton dengan produktivitas tertinggi 1,039 ton/ha diikuti oleh Kecamatan Miomafo Barat 4.259 ton (0,99 ton/ha); Kecamatan Insana 3.483 ton (1,037 ton/ha). Tanaman palawija hanya dapat dikembangkan di Kecamatan Miomafo Timur (kacang tanah) dan Kecamatan Insana (kacang hijau).



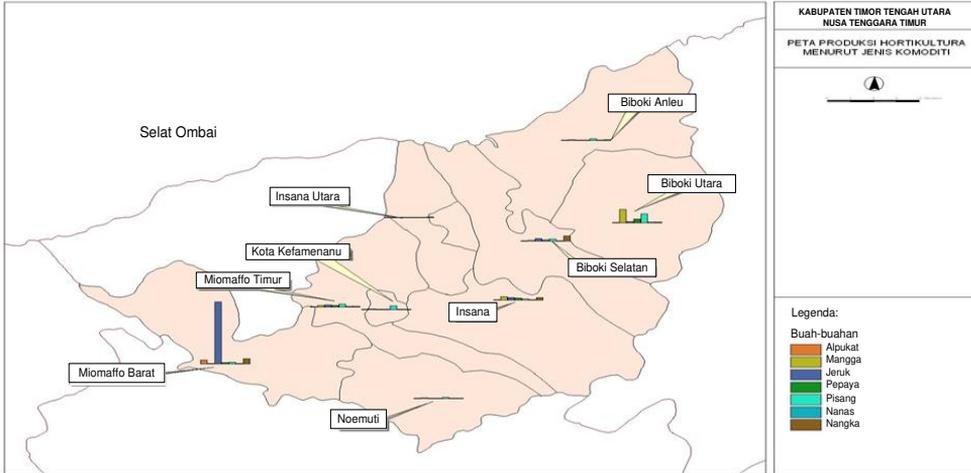
Gambar 1. Pemetaan potensi tanaman pangan dan palawija di Kabupaten Timor Tengah Utara per kecamatan tahun 2006

Tanaman jagung yang ditanam di Kabupaten Timor Tengah Utara umumnya dibudidayakan secara *multicrop* dengan ubi kayu dan kacang tanah atau kacang hijau. Produksi tertinggi untuk tanaman ubi kayu terdapat di Kecamatan Miomafo Timur, yakni 10.064 ton pada lahan seluas 1.455 ha dengan produktivitasnya sebesar 6,92 ton/ha, diikuti Kecamatan Insana 9.114 ton pada lahan seluas 1.300 ha dengan produktivitas 7,01 ton/ha. Produksi kacang tanah tertinggi terdapat di Kecamatan Miomafo Timur, yakni 219,9 ton pada lahan seluas 675 ha dengan produktivitas 0,326 ton/ha, diikuti oleh Kecamatan Biboki Utara dengan produksi 114, 5 ton pada lahan seluas 347 ha dengan produktivitas 0,329 ton/ha. Oleh karena itu, pengembangan agropolitan dengan potensi unggulan tanaman pangan lebih tepat dikembangkan di Kecamatan Miomafo Timur.

Pengembangan agropolitan dengan potensi unggulan utama sayur dan buah lebih tepat dikembangkan di Kecamatan Miomafo Barat karena kondisi iklim yang sesuai. Tanaman hortikultura tersebut berupa sayuran (kentang, wortel, bawang putih, dan bawang merah) dan buah-buahan (jeruk dan alpukat). Nenas dapat dikembangkan di Kecamatan Miomafo Timur dan Biboki Utara; pisang dikembangkan di Kecamatan Biboki Selatan; mangga dikembangkan di Kecamatan Insana dan Biboki Utara. Data selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 2.

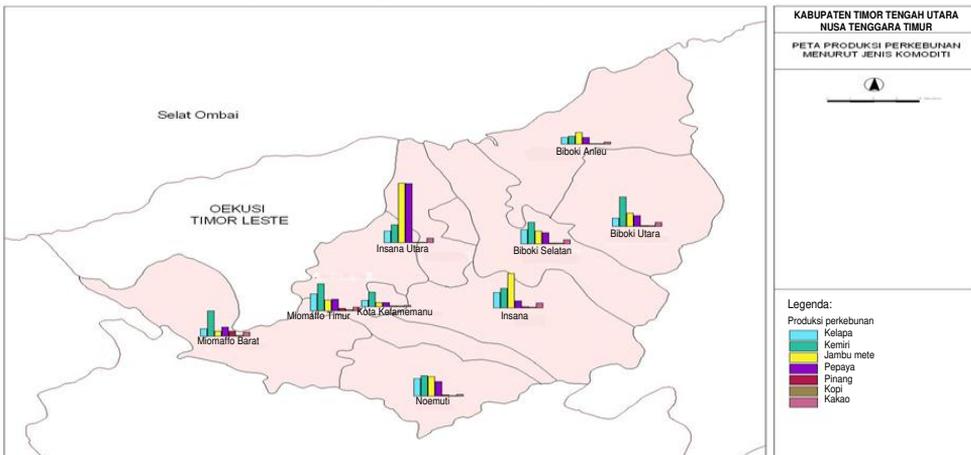
Selanjutnya komoditi perkebunan di Kabupaten Timor Tengah Utara seperti kemiri dan jambu mete yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara sebagai komoditas unggulan dapat dikembangkan di seluruh kecamatan.

Namun, yang lebih memiliki potensi pengembangan adalah di Kecamatan Insana Utara, Insana, Noemuti, Biboki Utara, Kecamatan Miomafo Timur. Sedangkan pinang lebih tepat dikembangkan di Kecamatan Insana Utara, Miomafo Timur dan Miomafo Barat. Dengan demikian, bila pengembangan agropolitan dengan potensi unggulan utama adalah komoditas perkebunan khususnya jambu mete dan kemiri maka pengembangannya lebih tepat dikembangkan di Kecamatan Insana Utara, Insana, Noemuti dan Biboki Utara.



Gambar 2. Pemetaan potensi tanaman hortikultura di Kabupaten Timor Tengah Utara per kecamatan tahun 2006

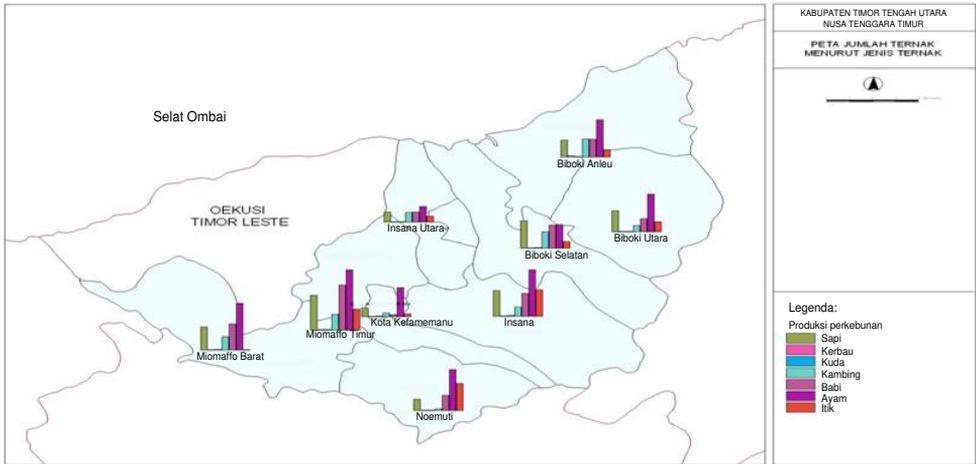
Masyarakat Kabupaten Timor Tengah Utara selain bertani juga mengintegrasikan usaha peternakan dengan usahataniya sehingga merupakan petani-peternak. Adapun ternak yang umumnya dipelihara berupa ternak besar (sapi, kerbau, kuda), ternak kecil (kambing dan babi) dan unggas (ayam dan itik). Namun demikian, ternak yang memiliki potensi pengembangan di seluruh kecamatan adalah sapi, kambing, babi, dan ayam.



Gambar 3. Pemetaan potensi tanaman perkebunan di Kabupaten Timor Tengah Utara per kecamatan tahun 2006

Walaupun demikian, kondisi eksisting menunjukkan bahwa Kecamatan Miomafo Timur memiliki jumlah sapi terbanyak pada tahun 2006, yakni 14.826 ekor diikuti Kecamatan Biboki Selatan 11.641 ekor dan Kecamatan Insana 10.718 ekor. Demikian pula untuk ternak babi, populasi tertinggi berada di wilayah Kecamatan Miomafo Timur yakni 19.210 ekor diikuti oleh Kecamatan Miomafo Barat 11.096 ekor dan Kecamatan Biboki Selatan 9.768 ekor. Jumlah kambing terbanyak masih didominasi oleh Kecamatan Biboki Selatan 6.960 ekor, diikuti Kecamatan Miomafo Timur dengan 6.668 ekor dan Kecamatan Miomafo Barat 5.655 ekor. Selanjutnya populasi ayam terbanyak juga terdapat di Kecamatan Miomafo Timur dengan 25.640 ekor, Miomafo Barat 19.857 ekor, Kecamatan Insana 19.575 ekor. Dengan demikian, data potensi peternakan menunjukkan bahwa Kecamatan Miomafo Timur menempati ranking tertinggi sehingga merupakan lokasi yang tepat untuk dijadikan pusat pengembangan agropolitan. Pemetaan potensi peternakan selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 4.

Berdasarkan pemetaan potensi komoditas di Kabupaten Timor Tengah Utara menunjukkan bahwa tanaman pangan dan peternakan yang merupakan prioritas pengembangan pada agropolitan di Kabupaten Timor Tengah Utara lebih tepat dikembangkan di Kecamatan Miomafo Timur dengan jagung sebagai komoditas utama karena memiliki nilai tambah bruto terbesar serta memiliki keterkaitan yang tinggi dengan sektor lainnya. Hal ini ditunjang dengan kondisi wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara yang didominasi oleh pertanian lahan kering dengan tanaman pokok jagung dan dibudidayakan secara *multicrop* dengan ubi kayu dan tanaman palawija (umumnya kacang tanah) serta diintegrasikan dengan peternakan.



Gambar 4. Pemetaan potensi peternakan di Kabupaten Timor Tengah Utara per kecamatan tahun 2006

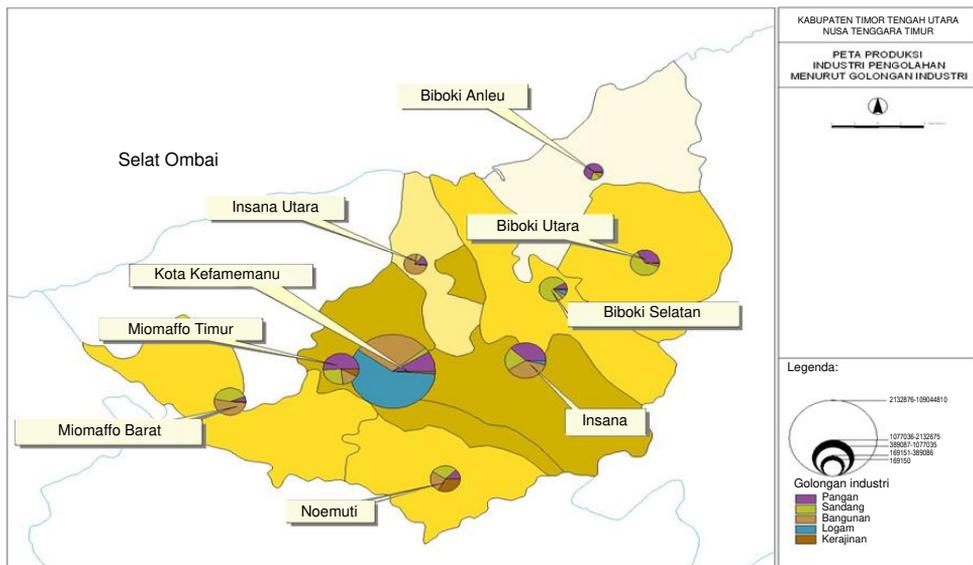
Berdasarkan hasil analisis *leading sector*, komoditas yang direkomendasikan untuk dikembangkan saat ini di Kabupaten Timor Tengah Utara adalah jagung, peternakan, dan hasilnya yang ditunjang oleh industri makanan dan minuman. Oleh karena itu, agropolitan jagung yang dibudidayakan secara *multicrop* dengan ubi kayu dan kacang tanah diintegrasikan dengan ternak sapi,

kambing, babi, dan ayam akan lebih tepat dikembangkan di Kecamatan Miomafo Timur karena memiliki jumlah ternak terbanyak dan produksi jagung tertinggi jika dibandingkan dengan kecamatan lainnya. Berdasarkan rangkuman hasil analisis mengenai potensi unggulan tersebut, wilayah perbatasan Kabupaten Timor Tengah Utara dengan distrik *enclave* Oekusi dapat dikembangkan menjadi kawasan agropolitan bertipologi komoditas primer, yakni mengembangkan kapasitas produksi *leading sector* tersebut. Pengembangan kapasitas produksi tersebut akan menggerakkan subsistem agribisnis lainnya, yakni penyediaan sarana produksi yang umumnya dapat diproduksi sendiri oleh pelaku agribisnis lainnya di Kabupaten Timor Tengah Utara.

Sektor pertanian sebagai sentra produksi agropolitan tidak dapat berdiri sendiri (*enclave*), tetapi harus didukung dengan sektor ekonomi lain yang berkaitan baik sektor ekonomi hulu yang menyediakan input maupun sektor ekonomi hilir yang memanfaatkan output sektor pertanian tersebut. Sektor hulu yang dapat dikembangkan adalah berupa penyediaan modal bagi petani dan kemudahan untuk mengakses modal tersebut sehingga petani dapat meningkatkan skala usahanya. Selain itu, penyediaan sarana produksi pertanian seperti bibit, pupuk, pestisida, serta peralatan pertanian yang dapat diperoleh dari wilayah sekitar. Lembaga yang diharapkan berperan dalam menyediakan sarana produksi adalah koperasi dan pengusaha lokal, sedangkan permodalan dapat diperoleh dari bank, pemerintah, LSM, koperasi, dan lembaga permodalan lainnya.

Melalui penyediaan sarana produksi tersebut diharapkan terjadi peningkatan kapasitas produksi sehingga akan memacu tumbuh dan berkembangnya kegiatan pascapanen seperti sortir, *packing* dan industri pengolahan makanan dan minuman. Hal ini akan memacu tumbuhnya pusat-pusat pertumbuhan baru berupa pusat pengumpul hasil pertanian dan sekaligus berfungsi mendistribusikan kebutuhan bagi petani. Oleh karena itu, diperlukan pewilayahan industri pengolahan sehingga mudah menentukan lokasi yang tepat bagi pengembangan agropolitan. Lokasi agroindustri paling tepat berada di Kecamatan Miomafo Timur dan Kecamatan Insana karena nilai produksinya yang cukup tinggi dengan produktivitas per unit usaha (Miotim Rp 95.795.000,-/industri/tahun dan Insana Rp 140.641.000,70/ industri/tahun) dan tenaga kerja tertinggi (Miotim Rp16.305.000,53/Tk/tahun dan Insana Rp 15.342.000,73/Tk/tahun) daripada kecamatan lainnya. Pewilayahan nilai produksi industri pengolahan per kecamatan selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 5.

Swasta dapat mengambil peran di sektor-sektor yang menyediakan input dan memanfaatkan output tersebut untuk pengolahan lebih lanjut dan kemudian memasarkannya ke wilayah lain. Kredit untuk sektor industri juga hanya sebesar Rp 196.000.000, sedangkan untuk sektor pertanian, sektor perdagangan, dan konsumsi masing-masing sebesar Rp 277.000.000, Rp 22.511.000.000, dan Rp 53.577.000.000. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Timor Tengah Utara umumnya masih konsumtif dan tidak memanfaatkan fasilitas kredit untuk kegiatan produktif. Sektor industri memiliki pengembangan yang kecil karena jumlah kredit lebih rendah jika dibandingkan dengan sektor pertanian dan perdagangan. Oleh karena itu, perlu disiapkan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan baik yang berkaitan dengan ilmu teknis maupun manajerial sehingga masyarakat memiliki jiwa *entrepreneur* dan dapat memanfaatkan fasilitas kredit untuk usaha-usaha produktif seperti usaha agroindustri.



Gambar 5. Pemetaan potensi agroindustri di Kabupaten Timor Tengah Utara per kecamatan tahun 2006

Pemanfaatan fasilitas kredit per kecamatan menunjukkan bahwa Kecamatan Miomafo Timur memiliki kredit tertinggi pada sektor perindustrian yang mengindikasikan adanya kesinkronan dengan kapasitas produksi sektor industri. Rincian posisi kredit per kecamatan dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Alokasi kredit di Kabupaten Timor Tengah Utara per kecamatan tahun 2006

No	Kecamatan	Kredit		
		Pertanian	Industri	Perdagangan
1	Miomafo Barat	29.000.000,-	5.000.000,-	141.000.000,-
2	Miomafo Timur	53.000.000,-	76.000.000,-	1.619.000.000,-
3	Noemuti	5.000.000,-	13.000.000,-	320.000.000,-
4	Kota Kefamenanu	-	-	19.303.000.000,-
5	Insana	79.000.000,-	49.000.000,-	269.000.000,-
6	Insana Utara	46.000.000,-	26.000.000,-	590.000.000,-
7	Biboki Selatan	-	-	-
8	Biboki Utara	65.000.000,-	27.000.000,-	269.000.000,-
9	Biboki Ainleu	-	-	-
Jumlah		277.000.000,-	196.000.000,-	22.511.000.000,-

Sumber : Timor Tengah Utara Dalam Angka 2006 (2006)

### Kriteria Tambahan

#### Kriteria sumber daya manusia

Penduduk di Kabupaten Timor Tengah Utara berjumlah 222.824 jiwa (laki-laki 110.235 jiwa dan perempuan 112.589 jiwa) yang terdiri dari 54.326 rumah tangga. Penduduk terbanyak di Kecamatan Miomafo Timur (41.020 jiwa). Apabila dikaitkan dengan jumlah minimal penduduk di pusat kawasan agropolitan dengan

pusatnya di wilayah kecamatan (tidak termasuk ibu kota kabupaten) sebagaimana kriteria yang ditetapkan oleh Friedman dan Douglass dalam Rustiadi dan Pribadi (2007), yakni 50.000 sampai 150.000 penduduk, Kecamatan Miomafo Timur yang memiliki jumlah penduduk terbanyak di Kabupaten Timor Tengah Utara, yakni 40.278 orang, lebih tepat menjadi pusat pengembangan agropolitan.

Pembangunan perdesaan yang berbasis agropolitan memerlukan partisipasi aktif dari setiap *stakeholder* terutama masyarakat di lokasi pengembangan agropolitan tersebut. Sebagaimana dinyatakan Cohen dan Uphoff dalam Darmawan *et al.* (2003) bahwa keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dalam implementasi program dirumuskan secara bersama-sama agar mereka juga terlibat dalam proses evaluasi dan *monitoring*.

Partisipasi aktif masyarakat terutama diharapkan berasal dari penduduk usia produktif. Oleh karena itu, dibutuhkan pengelompokan penduduk berdasarkan umur dan data BPS Timor Tengah Utara (2006) menunjukkan bahwa Kecamatan Miomafo Timur menempati peringkat tertinggi, yakni 18,32% dari total penduduk usia produktif (15-64 tahun) di Kabupaten Timor Tengah Utara. Selanjutnya, diikuti oleh Kecamatan Kota Kefamenanu (16,77%), Kecamatan Insana (16,12%), Kecamatan Miomafo Barat (14,37%), sedangkan kecamatan yang memiliki proporsi terkecil adalah Kecamatan Insana Utara (5,83%).

Pengembangan agropolitan juga dimaksudkan untuk mengurangi urbanisasi dengan menyediakan lapangan kerja yang dapat menyerap tenaga kerja di wilayah perdesaan sehingga wilayah perdesaan menjadi salah satu pusat kegiatan perekonomian yang menarik. Oleh karena itu, jika dikaitkan dengan jumlah penduduk yang bermigrasi keluar dan masuk per kecamatan, Kecamatan Insana memiliki tingkat migrasi penduduk keluar tertinggi dengan migrasi neto -124 diikuti oleh Kecamatan Miomafo Timur dengan migrasi neto -69.

Selanjutnya, jika dikaitkan dengan fungsi agropolitan sebagai penyedia lapangan kerja bagi pencari kerja, Kecamatan Miomafo Timur merupakan pusat agropolitan karena memiliki persentase pencari kerja/pengangguran tertinggi di Kabupaten Timor Tengah Utara, yakni 14,47%, diikuti dengan Kecamatan Noemuti (9,35%) dan Kecamatan Miomafo Barat (3,87%). Dengan demikian, berdasarkan kriteria SDM yang diukur dari jumlah penduduk, migrasi neto, dan tingkat pengangguran, Kecamatan Miomafo Timur menjadi pusat agropolitan, diikuti oleh Kecamatan Miomafo Barat, dan Kecamatan Insana.

### **Kriteria sumber daya buatan**

Pengembangan wilayah perbatasan sebagai kawasan agropolitan perlu didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. Prasarana yang dimaksud berupa prasarana ekonomi seperti pasar, perdagangan, bank, dan koperasi. Selain itu, prasarana pendidikan (TK, SD, SLTP, SMA, dan SMK) dan kesehatan (puskesmas perawatan, puskesmas nonperawatan, puskesmas pembantu, balai pengobatan, puskesmas keliling, posyandu, dan toko obat) yang merupakan komponen utama yang dapat menunjang pengembangan ekonomi di wilayah perbatasan.

Hasil analisis kriteria sumber daya buatan dengan menggunakan *skalogram* menunjukkan bahwa Kecamatan Miomafo Barat (14) dan Kecamatan Insana (14) diikuti oleh Kecamatan Insana Utara (13) menempati ranking tertinggi jika dibandingkan dengan kecamatan lainnya dari bobot tertinggi 16.

Data infrastruktur yang dianalisis menggunakan metode *skalogram* tersebut juga perlu ditunjang oleh pengembangan infrastruktur yang dapat menyuplai air bagi masyarakat sehingga dapat meningkatkan kapasitas produksi yang dapat dilakukan melalui pembangunan dam dan embung-embung, sumur bor, dan perpipaan (selokan). Selain itu, infrastruktur transportasi juga menjadi prioritas pengembangan sehingga masyarakat dapat mengakses pasar dengan mudah baik dalam memasarkan produknya maupun membeli produk-produk dari perkotaan. Hal yang perlu dihindari adalah eksploitasi terhadap sumber daya di perdesaan dengan kemudahan akses tersebut sehingga perlu *balance* antar-sumber daya yang terjual dan sumber daya yang dibeli, bahkan sumber daya yang terjual melalui eksploitasi juga harus tetap memperhatikan aspek keberlanjutan bagi generasi berikutnya. Dengan kata lain, perlu pengembangan interaksi yang mampu menciptakan *spread effect* bukan sebaliknya menimbulkan *backwash effect* bagi wilayah *hinterland*.

### **Kriteria sumber daya sosial**

Pengembangan Kabupaten Timor Tengah Utara menjadi kawasan agropolitan harus ditunjang dengan pemberlakuan regulasi yang tepat di wilayah perbatasan. Pemberlakuan regulasi tersebut seharusnya mencerminkan sinkronisasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten.

#### **Kebijakan pemerintah pusat**

Peraturan Presiden No.7 Tahun 2005 tentang RPJMN tahun 2004-2009 telah menetapkan Kabupaten Timor Tengah Utara sebagai salah satu dari 20 kabupaten di wilayah perbatasan yang perlu memperoleh prioritas pengembangan. Pengembangan kawasan perbatasan ditujukan untuk 1) menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) melalui penetapan hak kedaulatan NKRI yang dijamin oleh hukum internasional; 2) meningkatkan kesejahteraan masyarakat kawasan perbatasan dengan menggali potensi ekonomi, sosial budaya, serta keuntungan letak geografis yang strategis untuk berhubungan dengan negara tetangga. Selanjutnya, dalam RTRWN wilayah perbatasan ditetapkan menjadi kawasan strategis nasional (KSN) dengan kategori pengembangan E2 yang berarti pengembangan wilayah perbatasan Kabupaten Timor Tengah Utara dengan Timor Leste dimaksudkan untuk mengembangkan kawasan strategis nasional dengan sudut kepentingan pertahanan dan keamanan.

Kondisi tersebut mengisyaratkan bahwa pengembangan ekonomi wilayah perbatasan masih terpinggirkan dan masih menekankan pada aspek keamanan. Oleh karena itu, peningkatan perekonomian Kabupaten Timor Tengah Utara sebagai wilayah perbatasan yang merupakan halaman depan bangsa ini belum total dilaksanakan karena masih terjadi inkonsistensi dalam regulasi. Padahal sebagaimana dikemukakan oleh *stakeholder*, kondisi di wilayah perbatasan Kabupaten Timor Tengah Utara dengan distrik *enclave* Oekusi relatif aman dan walaupun terjadi konflik karena perebutan sumber daya akibat kesejahteraan yang rendah, penekanan pembangunan di Kabupaten Timor Tengah Utara sebagai wilayah perbatasan seharusnya pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan.

#### **Kebijakan pemerintah provinsi**

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur No. 2 tentang Propeda Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2008, dan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur No. 3 tentang Renstrada Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2008

yang disetarakan dengan RPJM Provinsi belum tegas menyatakan bahwa wilayah perbatasan merupakan wilayah yang perlu diprioritaskan pengembangannya. Meskipun dalam RPJP Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2005-2025 telah ditekankan wilayah perbatasan sebagai wilayah yang harus dipercepat pembangunannya, tetapi baru akan direalisasikan dalam RPJM Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap II (tahun 2009-2013). Meskipun demikian, RTRW Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2006-2020 telah memuat strategi pengembangan kawasan perbatasan negara melalui (a) upaya mendorong pengembangan kawasan perbatasan Republik Indonesia, Timor Leste, dan Australia sebagai beranda depan negara Indonesia di daerah dan (b) percepatan pembangunan kawasan perbatasan negara yang berlandaskan pada pola kesejahteraan, keamanan, dan kelestarian lingkungan.

Pengembangan wilayah perbatasan seharusnya ditindaklanjuti dengan kebijakan-kebijakan ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan di wilayah perbatasan. Pengembangan ekonomi wilayah perbatasan dalam RTRW provinsi hanya secara implisit memuat mengenai kawasan Noelbesi sebagai kawasan andalan yang mencakup Kapan (TTS)–Eban (Timor Tengah Utara)–Amfoang (Kupang) yang berada di wilayah perbatasan.

#### **Kebijakan pemerintah kabupaten**

RPJM Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2005-2010 menyatakan bahwa pengembangan pasar perbatasan menjadi salah satu sumber pendapatan daerah, tetapi karena regulasi yang belum konsisten dan diperlukan koordinasi yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten dan kerja sama dengan Timor Leste, pelegalan pasar perbatasan masih ditunda. Kondisi ini secara tidak langsung memaksa masyarakat di wilayah perbatasan untuk melakukan perdagangan ilegal karena perdagangan legal membutuhkan prosedur yang rumit dan biaya yang mahal.

Pelegalan pasar di wilayah perbatasan membutuhkan partisipasi aktif dari setiap *stakeholder* sehingga perlu menyiapkan regulasi yang tepat agar pembagian peran yang menimbulkan keterkaitan sinergis antarpelaku ekonomi, sektoral dan wilayah dapat berlangsung baik. Oleh karena itu, pengembangan wilayah perbatasan harus diarahkan dalam model pengembangan ekonomi tertentu sehingga Wini yang berjarak 8 km dari Oekusi dikembangkan menjadi kota satelit yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari RPJM Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2005-2010. Pengembangan Wini sebagai kota satelit diprioritaskan untuk pengembangan pelabuhan, pariwisata, industri, dan maritim.

Berdasarkan kajian terhadap kebijakan pengembangan wilayah perbatasan, diperlukan konsistensi kebijakan pemerintah pusat dalam pengembangan wilayah perbatasan terutama berkaitan dengan pengembangan yang lebih menekankan pada aspek ekonomi dan kesejahteraan. Percepatan pengembangan ekonomi wilayah perbatasan juga bukan hanya slogan belaka dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kabupaten Timor Tengah Utara, tetapi harus diikuti dengan kebijakan-kebijakan yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan. Selanjutnya, koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten serta koordinasi lintas sektor di wilayah perbatasan perlu dikembangkan dalam model agropolitan sebagaimana persepsi *stakeholder* dan masyarakat serta ditunjang dengan ketersediaan sumber daya di wilayah perbatasan.

Selain itu, sumber daya sosial lainnya yang perlu dipertimbangkan dalam penentuan lokasi agropolitan adalah berkaitan dengan jumlah kelompok tani di setiap kecamatan karena kelompok tani merupakan penggerak berkembangnya usaha-usaha di perdesaan. Berdasarkan kriteria jumlah kelompok tani, Kecamatan Miomafo Timur menempati ranking tertinggi sebagaimana data dari Badan Koordinasi Ketahanan Pangan Kabupaten Timor Tengah Utara yang menyatakan bahwa Kecamatan Miomamafo Timur memiliki kelompok tani terbanyak pada tahun 2007, yakni 208 kelompok tani, selanjutnya berturut-turut adalah Kecamatan Biboki Anleu 129 kelompok tani, Kecamatan Miomafo Barat 77 kelompok tani, Kecamatan Biboki Selatan 46 kelompok tani, Kecamatan Insana 43 kelompok tani, Kecamatan Insana Utara 41 kelompok tani, Kecamatan Biboki Utara 34 kelompok tani, dan Kecamatan Noemuti 31 kelompok tani.

Dalam menganalisis sumber daya tersebut, kriteria potensi unggulan menjadi kriteria utama, sedangkan kriteria sumber daya manusia, sumber daya buatan, dan sumber daya sosial serta fungsi agropolitan menjadi kriteria tambahan yang merupakan dasar dalam penentuan lokasi agropolitan sebagaimana diringkaskan pada Tabel 6.

Tabel 6. Rangkuman hasil analisis kriteria penentuan lokasi agropolitan per kecamatan di Kabupaten Timor Tengah Utara

No	Kriteria	MB	MT	N	I	IU	BS	BU	BA
1	Kriteria utama								
	Kapasitas produksi aktifitas ek.								
	a. LQ pangan	2	1	5	3	8	7	6	4
	b. LQ peternakan	6	2	5	8	3	4	7	1
	c. Produksi jagung	2	1	4	3	6	7	8	5
	d. Nilai produksi industri pangan	8	2	5	1	7	6	3	4
2.	Kriteria tambahan								
	a. Sumber daya manusia								
	- Jumlah penduduk	3	1	5	2	8	4	7	6
	- Pengangguran	3	1	2	4	8	6	5	7
	- Migrasi neto	8	2	3	1	5	7	6	4
	b. Sumber daya buatan	1	6	7	2	3	4	5	8
	c. SDS (jumlah kelompok tani)	3	1	8	5	6	4	7	2
	Jumlah	36	17	44	29	54	49	54	41

Sumber : Data (diolah), 2009

Keterangan: MB = Miomafo Barat, MT = Miomafo Timur, N = Noemuti, I = Insana, IU = Insana Utara, BS = Biboki Selatan, BU = Biboki Utara, BA = Biboki Anleu

Pengembangan ekonomi wilayah perbatasan dilakukan dengan model agropolitan berbasis jagung yang dibudidayakan secara *multicrop* dengan ubi kayu dan kacang tanah serta mengintegrasikannya dengan peternakan, serta ditunjang dengan agroindustri dari produk-produk tersebut dapat dikembangkan di Kecamatan Miomafo Timur. Selanjutnya, diperlukan keterkaitan antardesa di Kecamatan Miomafo Timur serta keterkaitan dengan wilayah kecamatan lainnya sehingga peran agropolitan dengan komoditas utama jagung, peternakan, dan industri makanan dan minuman dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh Kabupaten Timor Tengah Utara karena umumnya petani di Kabupaten Timor Tengah Utara secara keseluruhan mengembangkan usaha tani dengan komoditas-komoditas tersebut. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama dan koordinasi antarinstansi sektoral sehingga pengembangan kawasan ini menjadi lebih terarah.

Apalagi jika dibentuk lembaga otonom yang mengelola wilayah perbatasan sebagai kawasan agropolitan dengan melibatkan instansi-instansi sektoral sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan program di wilayah perbatasan. Lembaga tersebut dapat diperluas dengan melibatkan LSM-LSM yang memiliki wilayah kerja di wilayah perbatasan sehingga pembagian peran dapat berjalan dengan baik tanpa saling menyalahkan, tetapi sebaliknya saling menopang sehingga peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud.

Model kerja sama ekonomi dapat dijalin antara Indonesia dan Timor Leste terutama berkaitan dengan pengembangan komoditas pertanian yang nantinya dapat memberikan nilai tambah secara bersama pada masyarakat di wilayah perbatasan Kabupaten Timor Tengah Utara dengan distrik *enclave* Oekusi. Kerja sama yang telah dilakukan oleh Yayasan Mitra Tani Mandiri (YMTM) dari Kabupaten Timor Tengah Utara dengan pemerintah dan NGO dari Timor Leste dalam membantu memberikan ketrampilan kepada petani di distrik *enclave* Oekusi dalam melakukan pembudidayaan tanaman. Usaha-usaha lainnya dapat ditingkatkan sehingga pengembangan agropolitan pada kawasan perbatasan dapat terwujud dan kesejahteraan masyarakat kedua wilayah dapat meningkat. Kerja sama ini perlu ditunjang dengan pemberlakuan pas lintas batas (PLB) sehingga memudahkan interaksi dan mengintegrasikan pasar-pasar perbatasan dalam kawasan agropolitan melalui jaringan pemasaran dan infrastruktur yang mendukung.

## SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dipaparkan mengenai pengembangan ekonomi wilayah perbatasan Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan distrik *enclave* Oekusi, dapat disimpulkan sebagai berikut.

- (1) Pengembangan perekonomian wilayah perbatasan akan lebih terarah dan tepat sasaran serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kesenjangan pembangunan jika dikembangkan menjadi kawasan agropolitan karena sumber daya lahan yang masih memungkinkan untuk dikembangkan. Pengembangan agropolitan disesuaikan dengan potensi unggulan di setiap kecamatan di Kabupaten Timor Tengah Selatan.
- (2) Pengembangan agropolitan lebih tepat dikembangkan di Kecamatan Miomafo Timur karena memiliki sumber daya pembangunan yang lebih mendukung, dengan kriteria utama berupa komoditi unggulan jagung yang pembudidayaannya dilakukan secara *multicrop* dengan ubi kayu dan kacang tanah serta diintegrasikan dengan peternakan. Hal tersebut juga ditunjang dengan kriteria tambahan seperti sumber daya manusia, sumber daya buatan, dan sumber daya sosial. Industri makanan dan minuman lebih tepat dikembangkan di Kecamatan Miomafo Timur.

### Saran

Pengembangan ekonomi wilayah perbatasan Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan distrik *enclave* Oekusi memiliki keunikan dan kompleksitas

tersendiri. Oleh karena itu, pengembangannya perlu memperhatikan beberapa hal berikut.

- (1) Pengembangan ekonomi wilayah perbatasan membutuhkan sinkronisasi kebijakan dari pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten serta mampu mengakomodasi kearifan lokal di wilayah perbatasan. Oleh karena itu, wilayah perbatasan Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan distrik *enclave* Oekusi seharusnya dapat dipertimbangkan untuk pengembangan dengan kepentingan ekonomi (A/1) sehingga sinkron dengan kebijakan-kebijakan lainnya, bukannya kepentingan keamanan seperti saat ini (E/2).
- (2) Pengembangan agropolitan berbasis jagung yang diintegrasikan dengan peternakan di Kecamatan Miomafo Timur memerlukan jaringan interaksi yang saling menguntungkan dengan wilayah lainnya baik kecamatan lainnya maupun dengan Oekusi yang berbatasan langsung dengan Kecamatan Miomafo Timur sehingga perlu pembangunan jaringan transportasi antarwilayah tersebut. Selanjutnya, jaringan transportasi dan informasi antardesa di Kecamatan Miomafo Timur juga harus ditingkatkan agar dapat meningkatkan interaksi antardesa dan selanjutnya menciptakan *spread effect* antardesa dan wilayah lainnya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Bappenas. 2005. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009. Jakarta: Bappenas.
- Bappenas. 2005. Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara. Jakarta: Bappenas.
- Bappenas. 2006. Indeks Pembangunan Manusia 2004-2005. 2006. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- BPS Nusa Tenggara Timur. 2008. Provinsi Nusa Tenggara Timur Dalam Angka 2007. Kupang: Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- BPS Timor Tengah Selatan. 2008. Kabupaten Timor Tengah Selatan Dalam Angka 2007. Kefamenanu: Badan Pusat Statistik Kabupaten Timor Tengah Utara.
- BPS Ambenu. 1996. Kabupaten Ambenu Dalam Angka 1995. Oekusi: Badan Pusat Statistik Kabupaten Ambenu.
- BPS TimTim.1998. Provinsi Timor-Timur Dalam Angka 1997. Dili: Badan Pusat Statistik Provinsi Tim-Tim.
- Darmawan A, Hadi S, Pribadi DO, Laode I. 2003. Studi Kebijakan Pengembangan Partisipasi Masyarakat Perdesaan dan Perkotaan. Jakarta: Kementerian Negara Percepatan Kawasan Timur Indonesia.
- Departemen PU. 2007. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang. Jakarta: Departemen PU.
- Depdagri. 2005. Rencana Induk Pengembangan Wilayah Perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jakarta: Depdagri.

- Direccao Nacional de Estatistica. 2008. Tabelas Prioridade ba Distrito Oecusse. Dili: Fundu Populasaun Nasoens Unidas.
- Hamid, Alkadri. 2003. Model dan Strategi Pengembangan Kawasan Perbatasan Kabupaten Nunukan. Jakarta: Pusat Pengkajian Kebijakan Teknologi Pengembangan Wilayah BPPT.
- Hoover EM. 1985. An Introduction to Regional Economics. Distinguished Service Professor of Economics. New York: Emeritus University of Pittsburgh.
- Jhingan ML. 2004. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- LIPI. 2006. *Pengembangan Wilayah Perbatasan Timor Tengah Utara Melalui Penerapan Tekhnologi*. Subang: LIPI Press.
- Murty S. 2000 Regional disparities: need and measurs for balanced development, dalam *Regional Planning and Sustainable Development*. New Delhi: Kanishka Publisher.
- Nurdjaman P, Rahardjo SP. 2005. Platform Penanganan Permasalahan Perbatasan Antar-negara. Jakarta: Departemen Dalam Negeri, Direktorat Jendral Pemerintahan Umum dan Direktorat Wilayah Administrasi dan Perbatasan.
- Pemkab Timor Tengah Utara. 2006. Program Pembangunan Wilayah Perbatasan Kabupaten Timor Tengah Utara. Kefamenanu: Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara.
- Pemkab Timor Tengah Utara. 2006. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara 2005-2010. Kefamenanu: Pemkab. Timor Tengah Utara.
- Pemprov Nusa Tenggara Timur. 2005. Program Pembangunan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2004-2008. Kupang: Pemprov Nusa Tenggara Timur.
- Pemprov Nusa Tenggara Timur. 2005. Rencana Strategi Pembangunan Daerah Provinsi Timor Tengah Utara Tahun 2004-2008. Kupang: Pemprov Nusa Tenggara Timur.
- Pemprov Nusa Tenggara Timur. 2005. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Timor Tengah Utara Tahun 2005-2020. Kupang: Pemprov Nusa Tenggara Timur.
- Pemprov Nusa Tenggara Timur. 2006. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Timor Tengah Utara Tahun 2006-2020. Kupang: Pemprov Nusa Tenggara Timur.
- Riyadi, Bratakusumah DS. 2003. Perencanaan Pembangunan Daerah, Jakarta. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Rustiadi E, Saefulhakim S, Panuju DR. 2007. Perencanaan dan Pengembangan Wilayah. Bogor: Materi Kuliah Program Studi PWD Pascasarjana IPB.

- Rustiadi E, Hadi S, Widhyanto MA. 2006. *Kawasan Agropolitan*. Bogor: Crestpent Press.
- Rustiadi E, Pranoto S. 2007. *Agropolitan Membangun Ekonomi Perdesaan*. Bogor: Crestpent Press.
- Rustiadi E, Pribadi. 2006. *Mempercepat pertumbuhan pembangunan wilayah perbatasan*. Makalah disampaikan pada *workshop* pengembangan wilayah perbatasan. Jakarta: Depdagri.
- Saaty T. 1991. *Pengambilan keputusan (bagi para pemimpin)*. Jakarta: PT Pustaka Binamana Persindo.
- Saefulhakim S. 2003. *Prinsip-prinsip ekonomi regional dan perdesaan*. Bogor: Program Studi PWD, Institut Pertanian Bogor.
- Saefulhakim S. 2008. *Model Pemetaan Ekonomi untuk Perumusan Kebijakan Pembangunan Daerah*. Bogor: Cordia.
- Tarigan R. 2002. *Perencanaan Pembangunan Wilayah Pendekatan Ekonomi dan Ruang*. Laporan Penelitian Proyek Peningkatan Penelitian Pendidikan Tinggi. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Departemen Pendidikan Nasional.
- Tarigan R. 2004. *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Todaro, Smith. 2004. *Pembangunan ekonomi di dunia ketiga*. Jakarta: Erlangga.
- Tambunan TTH. 2003. *Perekonomian Indonesia beberapa permasalahan penting*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- UNDP, BPS, BAPPENAS. 2004. *Laporan Pembangunan Manusia*. 2004. Jakarta: BPS-BAPPENAS-UNDP.
- USAID. 2005. *Pengembangan Ekonomi Lokal Partisipatif*. Jakarta: LGSP.
- Wila MRC. 2006. *Konsepsi Hukum dalam Pengaturan dan Pengelolaan Wilayah Perbatasan antar Negara (kasus: Wilayah Enclave negara Timor Leste di dalam Wilayah Negara Indonesia)*. Bandung: PT Alumni.